

**UPAYA PERWUJUDAN INTEGRASI EKONOMI DI KAWASAN ASEAN
MELALUI KERJA SAMA *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT* DI INDONESIA,
MALAYSIA, DAN THAILAND PADA TAHUN 2018-2022**

Renny Miryanti, Muthia Latifa

Universitas Jenderal Soedirman
renny.miryanti@unsoed.ac.id, muthialatifa310@gmail.com

ABSTRAK

Kerja sama Local Currency Settlement yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand hadir sebagai upaya dari ketiga negara untuk mengurangi ketergantungan dolar AS dalam transaksi dan untuk mencapai integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya kerja sama Local Currency Settlement sebagai upaya perwujudan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN pada tahun 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori integrasi ekonomi menurut Bela Balassa, prakondisi integrasi dan tahapan integrasi menurut Dominick Salvatore, untuk mendukung penelitian juga digunakan konsep Local Currency Settlement. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah memenuhi faktor prakondisi integrasi yang mendukung ketiga negara mencapai tahapan integrasi yang lebih tinggi melalui implementasi LCS. Penggunaan LCS juga secara perlahan mulai naik tiap tahunnya sehingga penggunaan Dolar AS dalam transaksi keuangan dan perdagangan berkurang, hal ini mendukung terciptanya kestabilan mata uang lokal di ketiga negara dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Kata Kunci : ASEAN, Dolar AS, integrasi ekonomi, local currency settlement, mata uang lokal.

A. PENDAHULUAN

Liberalisasi perdagangan membawa semangat integrasi dari negara-negara di berbagai kawasan, situasi perdagangan internasional banyak berubah akibat dampak pasca Perang Dingin antara dua kekuatan besar di masa itu yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini juga diikuti dengan munculnya banyak perjanjian internasional di bidang ekonomi, sistem pasar bebas atau *Free Trade* mulai berkembang. Di masa ini banyak negara harus mampu mengikuti mekanisme pasar yang berubah, bentuk-bentuk intervensi negara diminimalisir (Yustika, 2002:77). Kondisi tersebut semakin menaikkan semangat negara-negara kawasan dalam membentuk regionalisme dan integrasinya sendiri untuk mengatasi

tantangan yang ada dan mempermudah kerja sama perdagangan, begitu juga dengan ASEAN.

Integrasi ekonomi di ASEAN sendiri dimulai sejak tahun 1967 yang ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok, kemudian pelaksanaan integrasi ekonomi semakin diperjelas dengan diberlakukannya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Adanya integrasi ekonomi akan memberikan manfaat terutama bagi negara anggota dan negara non anggota. (Ridwan, 2009:95). Jika melihat kembali sejarah yang pernah dialami oleh negara di Asia Tenggara maka krisis ekonomi adalah sejarah kelam yang sebisa mungkin berusaha dicegah agar tidak terulang kembali. Contohnya yaitu krisis ekonomi di Thailand pada 1997 yang mengakibatkan perdagangan internasionalnya mengalami penurunan. Negara lain di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia juga merasakan hal yang sama yaitu krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis ekonomi ini mengakibatkan nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar AS melemah. Jatuhnya nilai mata uang juga terjadi pada negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand, apabila dilihat dalam hitungan persen maka Indonesia mengalami penurunan terbesar yaitu nilai rupiah turun sejumlah -73,9%, Thailand mengalami penurunan nilai mata uang baht sebesar -37,5% (Nugroho, 2019 dalam Aziza dkk, 2019:26). Sedangkan untuk Malaysia mengalami penurunan nilai ringgit sebesar 50% (Prema-Chandra, 2010 dalam Shuib dkk, 2020:376).

Permasalahan krisis ekonomi Asia Tenggara 1997-1998 adalah salah satu contoh dampak negatif ketergantungan mata uang asing, terutama dolar AS terhadap ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, beberapa negara di Asia Tenggara telah berusaha untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa mereka, meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, dan mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan dolar di suatu negara yang dapat dicapai salah satunya dengan menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS) dalam transaksi di kawasan yang juga menjadi upaya perwujudan integrasi ekonomi di suatu kawasan, dalam hal ini yaitu integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Ketiga negara yang melakukan kerja sama LCS yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki kepentingan untuk mengurangi ketergantungan Dolar AS yang bisa saja mengganggu arus perdagangan ekspor-impor di tiga negara tersebut (Muta'ali, 2020:218).

Penggunaan LCS di kawasan ASEAN telah dilakukan oleh tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Inisiasi kerjasama ini dimulai pada 23 Desember 2016 Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), dan Bank of Thailand (BOT) secara resmi menandatangani kesepakatan ini, ketiga bank tersebut merupakan bank sentral yang

ditunjuk oleh tiap negara guna memudahkan proses penggunaan LCS. Ketiga negara tersebut berharap jika kerja sama LCS akan mencapai setidaknya tiga tujuan, pertama meningkatkan hubungan baik Indonesia, Malaysia, Thailand dalam hal perdagangan, terutama karena tiga negara ini menjadi mitra dagang terbesar di lingkup kawasan ASEAN, kedua mengurangi ketergantungan Dolar AS dan memberdayakan mata uang lokal (Rupiah, Ringgit, Baht) agar nilainya stabil dalam perdagangan ekspor-impor, dan yang ketiga memelihara stabilitas sistem keuangan negara yang masih rawan terganggu (Asian Development Bank, 2017). Marpaung (2013) dikutip oleh Basyariah & Khairunisa (2016:228) menjelaskan jika kawasan Asia Tenggara memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar sehingga memiliki peluang untuk terus berkembang, terutama di bidang perdagangan. Penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang framework kerja sama LCS oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang merupakan upaya perwujudan integrasi ekonomi kawasan oleh negara ASEAN dalam mengurangi ketergantungan dolar AS dan memberikan manfaat lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Penelitian kualitatif berusaha menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan cara deskripsi menggunakan penjelasan yang berupa kata-kata dan bahasa. Sedangkan deskriptif dipilih karena dapat memberikan gambaran secara detail dan mendalam. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian atau penjelasan fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan penelitian lain (Sodik & Siyoto, 2015:11). Sumber data yang termasuk sekunder adalah literatur buku, artikel dalam jurnal ilmiah, website resmi, atau sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder juga dapat berupa dokumen-dokumen grafis seperti tabel dan catatan notulen rapat (Sodik & Siyoto, 2015:28).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prakondisi Integrasi Ekonomi ASEAN di Indonesia, Malaysia, Thailand

Prakondisi integrasi merupakan salah satu faktor penting apakah integrasi dapat berlangsung. Asimilasi sosial menjadi faktor penting pertama dalam prakondisi negara di kawasan agar dapat mencapai integrasi ekonomi. Dalam kaitannya dengan faktor prakondisi integrasi ekonomi, Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah memenuhi persyaratan ini.

Ketiga negara merupakan bagian dari ASEAN dan dalam konteks mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN negara-negaranya memiliki kedekatan budaya sehingga rasa toleransi dan saling pengertian akan mudah tercipta apabila nantinya terjadi perbedaan nilai-nilai kepentingan (Bakry, 2019:169). Kedekatan budaya ini salah satunya disebabkan letak geografis ketiga negara yang berdekatan dengan jalur perdagangan antara Cina dengan India, sejak dulu perdagangan selalu membawa pertukaran budaya dan hal ini juga terjadi pada ketiga negara yang pada akhirnya mendapatkan pengaruh yang sama (Sunarti, 2013:80).

Faktor prakondisi integrasi yang selanjutnya adalah kesamaan nilai, di antara negara-negara yang akan melakukan integrasi ekonomi harus terdapat persamaan nilai dalam memandang masalah ekonomi yang ada, kesamaan ini dimaksudkan untuk menghindari miskonsepsi yang dapat menyebabkan konflik. Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki pandangan yang sama terhadap masalah ketergantungan dolar AS (Bakry, 2019:169). Kesamaan nilai terkait LCS yang pertama untuk memudahkan dan meningkatkan nilai ekspor impor, selanjutnya LCS dapat dijadikan instrumen baru dalam investasi dan menjadi alternatif selain dolar AS, para pelaku usaha secara perseorangan atau kelompok dapat melakukan investasi di tiga negara secara langsung. Selain itu instrumen investasi ini juga bisa digunakan oleh usaha mikro dalam mencari investor di luar negaranya sehingga usaha yang tadinya berskala kecil dapat berkembang lebih besar (Muta'ali, 2020:2018).

Faktor ketiga adalah keuntungan bersama, dalam upaya mencapai integrasi tiap negara harus mengorbankan sebagian hak-hak nasional atau kedaulatannya sehingga keuntungan yang dicapai dari integrasi ekonomi harus jelas dan dirasakan oleh semua negara yang terlibat dalam integrasi (Bakry, 2019:169-170). Indonesia, Malaysia, dan Thailand melihat keberhasilan integrasi ekonomi di Uni Eropa sebagai contoh sehingga ketiga negara sadar jika integrasi ekonomi akan membawa keuntungan bersama yang lebih besar daripada kawasan yang integrasi ekonominya belum kuat.

Prakondisi integrasi ekonomi yang keempat adalah biaya relatif rendah atau *relatively low cost*, artinya dalam proses mencapai integrasi ekonomi keuntungan yang akan didapatkan harus lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Pembentukan integrasi ekonomi didasarkan pada prinsip *low cost benefit calculations*, untuk mencapai integrasi ekonomi diperlukan proses yang tidak sebentar dan tentunya membutuhkan biaya yang tinggi, sebelumnya perlu dipastikan jika keuntungan yang nantinya didapatkan akan lebih banyak sehingga bisa membuat biaya yang telah dikeluarkan terlihat relatif rendah (Bakry, 2019:170). Biaya relatif rendah ini sebelumnya sudah terlihat dalam pengimplementasian

AFTA oleh ASEAN. Penurunan tarif hingga 0-5% merupakan biaya atau pengorbanan yang dilakukan oleh negara, tetapi sebagai timbal baliknya hambatan perdagangan juga ikut dihapuskan. Dampak positif lainnya yang didapatkan yaitu, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi domestik, terutama di sektor industri, memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui impor, dan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat (Nurhayati, 2017:41).

Faktor kelima adalah kedekatan di masa lalu, kedekatan di masa lalu dapat membuat hubungan antarnegara menjadi lebih erat dan merupakan salah satu pondasi penting bagi integrasi ekonomi yang berpusat pada kegiatan kerja sama (Bakry, 2019:170). Masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki hubungan yang dekat sejak masa lampau, ketiga negara ini memiliki warisan sejarah dan budaya yang saling berkaitan. Penduduk di ketiga negara juga berasal dari rumpun bangsa yang sama, Thailand jika berdasarkan sejarah merupakan bangsa yang berasal dari selatan Sungai Yangtze, tepatnya berada di Provinsi Yunan, China. Bangsa Indonesia dan Malaysia juga berasal dari kelompok etnis Mongoloid dari Yunan, China (Kumparan, 2022).

Faktor pendorong terakhir dalam prakondisi integrasi ekonomi yaitu pengaruh eksternal, ikatan yang menghubungkan negara dalam integrasi ekonomi akan semakin kuat apabila terdapat ancaman eksternal yang sama-sama dihadapi. Ancaman ini dapat menjadi kekuatan karena negara merasa perlu membentuk kelompok guna mengatasi ancaman ini (Bakry, 2019:170). Indonesia, Malaysia, dan Thailand menjalin kerja sama LCS sebagai bentuk perlindungan akibat krisis ekonomi yang dihadapi pada 1998, krisis ini terjadi karena tingkat ketergantungan dolar AS yang tinggi. Belajar dari hal tersebut dibutuhkan kerja sama yang menguatkan mata uang lokal sekaligus menghindari bencana krisis ekonomi yang mungkin kembali terjadi. Bahkan sebelum adanya krisis ekonomi tahun 1998, ancaman ekonomi juga sudah mengintai negaranegara ASEAN sehingga beberapa negara ASEAN mulai merencanakan pembentukan regionalisme kawasan.

Implementasi *Local Currency Settlement* pada 2018-2022

Tahun 2018 menjadi tahun pertama diimplementasikannya kebijakan LCS, pada tahun ini tiap negara telah memilih beberapa bank sebagai bank fasilitator atau *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). Bank ACCD melakukan berbagai kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk mendukung pelaksanaan LCS. Kegiatan dan transaksi tersebut meliputi beberapa aspek penting, di antaranya adalah pembukaan Special Non-Resident

Account (SNA) dalam mata uang Rupiah dan SNA untuk negara mitra, serta pembukaan Sub-SNA untuk negara mitra. Selain itu, Bank ACCD juga melakukan transaksi dalam mata uang lokal atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra, memberikan pembiayaan perdagangan, mengelola saldo SNA dan saldo Sub-SNA, serta melakukan transfer dana. Semua kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan LCS, mendukung stabilitas keuangan, dan mempererat kerja sama ekonomi dengan negara mitra (Bank Indonesia, 2017).

Skema pembayaran menggunakan LCS di tahun 2018 telah terbukti meningkatkan jumlah transaksi antara ketiga negara, contohnya adalah transaksi Indonesia dengan Thailand yang pada sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak US\$ 16,32 miliar namun transaksi ini masih memiliki tingkat penggunaan dolar AS yang tinggi yaitu sebanyak 90% dari total transaksi, kemudian setelah diberlakukannya kerja sama LCS mengalami peningkatan (Suryanto, 2020). Untuk perdagangan dengan Malaysia dalam kurun waktu 2010-2016 transaksi yang tercatat mencapai angka rata-rata yang tinggi yaitu sekitar US\$ 19,5 miliar per tahun. Perdagangan ini mencakup sektor migas dan nonmigas, untuk ekspor sektor migas pada 2017 saja mencapai US\$ 5,79 miliar (Fauzie, 2017). Sayangnya nilai perdagangan yang tinggi ini masih menggunakan dolar AS dalam jumlah yang besar yaitu 94% dari total transaksi (Fauzie, 2018). Setelah diberlakukannya LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand terbukti transaksi perdagangan di antara ketiga negara mengalami peningkatan sebanyak 1,4%, angka penggunaan dolar AS juga mulai berkurang (Suryanto, 2020).

Pada 2019 ketiga negara berfokus pada kegiatan promosi LCS agar lebih banyak digunakan. Indonesia 9 melakukan berbagai sosialisasi untuk mempromosikan penggunaan LCS kepada masyarakat luas, sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut juga dihadiri oleh perwakilan bank ACCD, saat sosialisasi berlangsung importir dan eksportir yang dinilai potensial diberi dukungan penuh untuk mulai menggunakan LCS dalam transaksi dengan Malaysia dan Thailand (Pramesti, 2019). Malaysis merilis *info sheet* berisi informasi kerja sama LCS dengan Indonesia dan Thailand, *info sheet* ini mempermudah sosialisasi LCS kepada masyarakat luas (Bank Negara Malaysia, 2019). Thailand sendiri aktif mempromosikan LCS tidak hanya kepada masyarakat di dalam negeri tetapi juga kepada negara lainnya, pada 2019 Bank of Thailand menandatangani MoU dengan dua bank sentral yaitu Bank Indonesia dan Bank Sentral Republik Demokratik Rakyat Laos (Lao PDR) (Thaipublica, 2019).

Transaksi perdagangan menggunakan LCS yang tadinya pada 2018 hanya meningkat sebesar 1,4%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,6%. Kegiatan ekspor antara Indonesia dengan Thailand juga turut mengalami peningkatan yang semula hanya US\$ 0,54 miliar menjadi US\$ 0,72 miliar, tentunya transaksi ini dilakukan dalam mata uang lokal yaitu baht Thailand (Suryanto, 2020). Peningkatan penggunaan LCS juga terlihat dalam jumlah total penggunaan baht Thailand yang di tahun 2018 baru mencapai Rp 96 miliar menjadi Rp 185 miliar di tahun 2019, transaksi dengan ringgit Malaysia juga turut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 (Pramesti, 2019).

Tahun 2020 menjadi tahun persebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan pandemi secara global sehingga mempengaruhi banyak hal, perekonomian menjadi salah satu bidang yang paling terdampak sehingga di tahun ini tidak banyak kebaruan dan perkembangan dari kerja sama LCS di tiga negara. Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12./Pbi/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank, dikeluarkannya peraturan ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 resmi dicabut dan tidak lagi berlaku. Indonesia masih menunjukkan komitmennya terkait LCS di tahun 2020 karena ingin menjaga stabilitas nilai tukar mata uang yang menjadi salah satu syarat utama mencapai stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2020). Pada tahun ini masing-masing bank sentral dari tiap negara juga melakukan penambahan penunjukkan bank ACCD.

Tahun 2021 menjadi tahun keempat kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand berlangsung. Indonesia mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank (Bank Indonesia, 2021). Thailand di tahun 2021 meluncurkan kerja sama Cross Border QR Payment dengan Indonesia. Melalui kerja sama QR ini pembeli dan pedagang dari kedua negara dapat melakukan transaksi pembayaran langsung yang mudah untuk sektor barang dan jasa. Berlakunya pembayaran QR ini menjadi sistem transaksi baru yang menghubungkan kedua negara, Bank of Thailand menyatakan jika kerja sama QR antara pihaknya dengan Indonesia akan mendorong integrasi ekonomi kawasan ASEAN (Bank of Thailand, 2021). Pada tahun 2021 Malaysia juga melakukan pembaruan kerja sama LCS dengan menambah jumlah bank ACCD untuk Indonesia dan Thailand (Bank Negara Malaysia, 2021).

Transaksi perdagangan Indonesia dengan Malaysia di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 42,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menjadi nilai perdagangan tertinggi antara Indonesia dan Malaysia dalam tujuh tahun terakhir (Rahman, 2022). Jumlah transaksi dengan Thailand juga mengalami kenaikan dari tahun 2020, tercatat nilai perdagangan pada tahun 2021 antara Indonesia dan Thailand tumbuh 40,04% dengan nilai ekspor yang naik sebesar 38,74% dan nilai impor naik 41,06% (Rahman, 2021). Pada tahun ini tidak hanya nilai transaksi perdagangan saja yang meningkat, jumlah penggunaan LCS juga mengalami peningkatan mencapai UD\$ 2,53 miliar (Indonesia.go.id., 2021).

Pada tahun 2022 fokus tiap negara dalam kerja sama LCS adalah mengembangkan *Cross Border QR Payment*, hal ini dapat dilihat dari mulai berlakunya kerja sama QR antara Indonesia dan Thailand yang akan efektif dari tanggal 29 Agustus 2022 setelah di tahun sebelumnya dilakukan uji coba selama satu tahun. Bank sentral masing-masing negara yaitu Bank Indonesia dan Bank of Thailand menyatakan jika warga dari kedua negara dapat memindai kode QR menggunakan aplikasi keuangan, untuk Indonesia skema memiliki nama *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) sedangkan di Thailand hadir dengan nama *Thai QR codes* (HKDT Research, 2022). Selain kerja sama QR, Bank Indonesia dan Bank of Thailand juga mulai mengembangkan skema cross border payment yang akan memperluas koneksi antara BI-Fast Indonesia dan PromptPay Thailand sehingga nantinya akan memungkinkan transfer lintas negara secara real time. Hal ini juga sejalan dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang menyediakan kebijakan, aturan, dan prinsip yang mengatur cross border e-commerce (Nugroho, 2022).

Kerja sama *cross border QR payment* juga mulai dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia setelah melihat keberhasilan kerja sama dengan Thailand. Proyek ini akan memulai uji coba pada tahun 2022 dan diperkirakan secara resmi mulai berlaku pada 2023. Deputy Gubernur Bank Negara Malaysia, Jessica Chew Cheng Lian, menyatakan bahwa pembayaran QR ini menjadi tonggak penting bagi kedua negara, perkembangan pembayaran QR akan membawa ASEAN lebih dekat mencapai visinya untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat dan efisien. Hal ini juga akan semakin mempercepat transformasi digital dan integrasi ekonomi negara-negara di ASEAN (Bank Negara Malaysia, 2022).

Total perdagangan Indonesia dengan Malaysia di tahun 2022 sejumlah US\$ 27,906 miliar, untuk ekspornya yaitu senilai US\$ 15,429 miliar dan impor sejumlah US\$ 12,477 miliar, angka ini meningkat dari jumlah perdagangan di tahun sebelumnya (Satudata

Kemendag, 2023). Untuk transaksi dengan Thailand tercatat senilai US\$ 19,186 miliar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 8,196 miliar dan impor sejumlah US\$ 10,990 miliar, total transaksi perdagangan ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Satudata Kemendag, 2023). Untuk jumlah transaksi QR di Indonesia dan Thailand sendiri mencapai Rp 8,65 miliar dengan rincian sebanyak 14.555 transaksi wisatawan Indonesia di Thailand dengan nilai transaksi Rp 8,54 miliar dan 492 transaksi untuk wisatawan Thailand di Indonesia dengan jumlah Rp 114 juta (ASEAN Indonesia, 2023).

Integrasi Ekonomi Pasca Implementasi *Local Currency Settlement*

Dalam integrasi ekonomi ASEAN keberadaan LCS merupakan salah satu cara mencapai tahapan ekonomi selanjutnya, adanya LCS mendorong integrasi menuju tahapan *Common Market* dan bahkan dapat mencapai *Economic Union*. Pada tahapan *common market* hambatan yang dihilangkan bukan hanya dalam perdagangan barang tetapi hambatan modal atau investasi juga ikut dihilangkan dan LCS mampu menghilangkan hambatan tersebut. Ini terlihat dari kebijakan investasi atau penanaman modal secara langsung antara Malaysia dan Thailand yang transaksinya dapat menggunakan mata uang lokal sehingga mengurangi biaya transaksi (Bank Negara Malaysia, 2019). Peraturan terkait *underlying* transaksi investasi juga diperbarui seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Selain itu inovasi penggunaan QR yang sudah dilakukan oleh ketiga negara juga menambah argumen jika LCS mampu mengurangi hambatan penanaman modal di antara negara yang telah memberlakukan kerja sama tersebut.

Selanjutnya yaitu terkait *economic union* yang merupakan tahapan tertinggi dari integrasi ekonomi kawasan yang mana tiap negara anggota kawasan menyamakan kebijakan ekonomi fiskal dan moneternya sehingga tercipta harmonisasi perdagangan (Salvatore, 2013, hal. 301). Kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara seperti anggaran pemerintah dan pajak, sementara kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral negara terkait uang yang beredar. Kesepakatan LCS dilakukan oleh Bank Sentral masing-masing negara, penggunaan mata uang lokal juga ditujukan untuk menambah jumlah mata uang lokal yang digunakan dan mengurangi penggunaan dolar AS yang bisa menyebabkan ketergantungan sehingga kerja sama ini termasuk dalam kebijakan moneter.

LCS telah memenuhi beberapa poin tahapan integrasi ekonomi dalam *common market* dan *economic union*, namun belum semua poin dapat dicapai contohnya kebijakan

fiskal tipan negara masih berbeda. Dengan diberlakukannya implementasi LCS oleh ketiga negara sejak tahun 2018-2022 kita bisa melihat bahwa tiap tahunnya penggunaan LCS mengalami kenaikan, meskipun kenaikan ini belum mencapai angka yang signifikan. Adanya kemudahan penggunaan LCS dengan menggunakan QR juga menjadi hal yang patut dibanggakan, peneliti merasa jika kebijakan ini akan menjadi batu loncatan yang bisa menaikkan penggunaan LCS oleh tiga negara. Integrasi ekonomi kawasan setelah diberlakukan LCS juga mengalami perkembangan yang baik karena akan terus berkembang menuju tahapan integrasi selanjutnya sehingga hambatan dalam bidang ekonomi dapat terus dikurangi.

D. KESIMPULAN

Permasalahan krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada tahun 1998 merupakan sejarah buruk yang sebisa mungkin berusaha dicegah agar tidak terjadi kembali. Dalam mencegah hal tersebut dibuatlah skema kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) untuk mengatasi ketergantungan dolar AS yang merupakan alasan krisis ekonomi tahun 1998, LCS juga menjadi bentuk lanjutan dari integrasi ekonomi yang sejak dulu berusaha ASEAN capai. Walaupun terdapat perbedaan tetapi ketiga negara mampu memenuhi keenam faktor prakondisi integrasi. Ketiga negara yang menjadi penggagas awal kerja sama ini merupakan negara dengan perekonomian yang kuat di antara negara ASEAN lainnya, LCS yang semula dimulai pada 2018 telah mencapai berbagai pencapaian, seperti menaikkan total transaksi antar negara, menguatkan mata uang lokal, mengurangi biaya dalam transaksi, dan memberikan kemudahan dalam transaksi digital melalui pengembangan kode QR. Meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian negara, nyatanya penggunaan LCS tidak terlalu terpengaruh karena transaksi di antara Indonesia dan Malaysia yang tetap meningkat.

Integrasi ekonomi ASEAN yang awalnya berada pada tahapan *Custom Union* akan terus berkembang menuju *Common Market* dan *Economy Union* karena kebijakan LCS yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi moneter. Ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga terus menunjukkan komitmennya dengan mengembangkan skema LCS agar semakin mudah digunakan dan mengjangkau banyak kalangan. Namun LCS sebagai kebijakan ekonomi tidak bisa dilihat hanya berdasarkan angka karena hingga lima tahun penggunaannya angka transaksi dengan mata uang lokal belum bisa mencapai seperempat dari total transaksi, LCS harus dipandang sebagai kebijakan ekonomi jangka

panjang yang manfaatnya akan semakin terasa seiring berjalannya waktu yaitu tercapainya integrasi ekonomi dan berkurangnya ketergantungan dolar AS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakry, U. S. (2019). *Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balassa, B. (1969). *The Theory of Economic Integration, Third Impression*. Homewood (IL): Richard D. Irvin.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics 11th Edition*. New York: Wiley.
- Sodik, A. & Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Yustika, A.E., (2002). *Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal

- Aziza, A. N., Fathana, A., & Yulianto, A. F. (2019). Analisis Peran IMF terhadap Fenomena Inflasi tahun 1997-1998 di Negara Thailand. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(1), 25-34.
- Basyariah, N., & Khairunisa, H. (2016). Analisis Stabilitas Nilai Tukar Mata Uang Asean-10 Terhadap Dolar As Dan Dinar Emas. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 227-253.
- Muta'ali, H. N. (2020). Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama Local Currency Settlement Framework (LCS). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(1), 212-222.
- Nofansya, A. & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164-178.
- Rasdiyanti, A. D. (2022). Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia China. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 13-24.
- Ridwan. (2009). Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi di Kawasan ASEAN: Analisis Model Gravitas. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5(2), 95-107.
- Shuib, M. S., Keling, M. F. and Osman, N. (2020). Mahathiriskonomism: Memperjelas Peranan Mahathir Mohamad dalam Pengurusan Krisis Ekonomi 1997/98, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(12), pp. 374 - 391.

Artikel surat kabar: *online*

- ASEAN. (2023). "QRIS Simplified Payment in ASEAN Countries". *ASEAN*. Diakses dari: <https://asean2023.id/en/news/qr-simplifies-payments-in-asean-countries>
- Asian Development Bank. (2017). "Imt-Gt Leaders' Declaration On The Adoption Of The ImtGt Implementation Blueprint 2017- 2021". *Asian Development Bank*. Diakses dari Asian Development Bank: <https://www.adb.org/sites/default/files/related/41543/imt-gt-implementationblueprint2017-2021.pdf>
- Bank Indonesia. (2020). "Perjanjian atau peraturan kerja sama LCS secara umum sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/ 12./Pbi/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank". *BI*. Diakses dari Bank Indonesia: <file:///C:/Users/Admin/Downloads/PERATURAN%20BANK%20INDONESIA%202020.pdf>
- Bank Negara Malaysia. (2019, 30 Agustus). "Information on Local Currency Settlement Framework" *Bank Negara Malaysia*. Diakses dari: <https://www.bnm.gov.my/-/information-on-local-currency-settlement-framework>.
- Bank Negara Malaysia. (2021). "Further Expansion of The Local Currency Settlement Framework Between Bank Negara Malaysia and the Bank of Thailand". *BNM*. Diakses dari: <https://www.bnm.gov.my/-/further-expansion-of-the-local-currency-settlementframework-between-bank-negara-malaysia-and-the-bank-of-thailand>
- Bank Negara Malaysia. (2021). "Further Expansion of The Local Currency Settlement Framework Between Bank Negara Malaysia and the Bank Indonesia". *BNM*. Diakses dari: <https://www.bnm.gov.my/-/expansion-local-currency-settlement-framework-bnm-bi>
- Bank Negara Malaysia. (2022). "Lauch of the Cross-Border QR Payment Linkage Between Malaysia and Indonesia". *BNM*. Diakses dari: <https://www.bnm.gov.my/-/duitnow-qr-linkmy-id>
- Bank of Thailand. (2021). "Joint Press Release Indonesia and Thailand Launch Cross-border QR Payment Linkage". *BoT*. Diakses dari: <https://www.bot.or.th/en/news-andmedia/news/news-20210817-2.html>
- Fauzie, Yuli Yanna. (2018). *Dampak Minim Transaksi Ringgit dan Baht ke Ekspor Impor RI*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171212171647-92-261887/dampak-minim-transaksi-ringgit-dan-baht-ke-ekspor-impor-ri>

- HKDT Research. (2022). *Indonesia: ASEAN QR Cross Border Start with Thailand*. Diakses dari: <https://research.hktdc.com/en/article/MTE5MTU3OTAzNg>
- Indonesia.go.id. (2022). *Penggunaan Mata Uang Lokal, Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses dari: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4992/penggunaan-mata-uang-lokal-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional?lang=1>
- Nugroho, Aprianto Cahyo. (2022). *Mencoba Transaksi Pakai QRIS di Thailand Begini Langkah-Langkahnya*. Diakses dari: <https://finansial.bisnis.com/read/20221211/90/1607459/mencoba-transaksi-pakai-qr-is-di-thailand-begini-langkah-langkahnya>
- Pramesti, Iswari Inggit. (2019). *Gencarkan Penggunaan Mata Uang Lokal di ASEAN Ini Langkah BI*. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190416165149-17-67136/gencarkan-penggunaan-mata-uang-lokal-di-asean-ini-langkah-bi>
- Rahman, Dzulfiqar Fathur. (2022). *Perdagangan Indonesia-Malaysia Menguat pada 2021*. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/26/perdagangan-indonesia-malaysia-menguat-pada-2021#:~:text=Hubungan%20perdagangan%20Indonesia%20dan%20Malaysia,45%20miliar%20pada%20tahun%202021>
- Rahman, Dzulfiqar Fathur. (2021). *Perdagangan Indonesia dan Thailand Tumbuh 40% pada 2021*. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/10/perdagangan-indonesia-dan-thailand-tumbuh-40-pada-2021#:~:text=Menurut%20pangkalan%20data%20perdagangan%20Perserikatan,on%2Dyear%2Fyoy>
- SatuData Kementerian Perdagangan. (2023). "Neraca Perdagangan dengan Mitra Dagang Malaysia". *Kemendag*. Diakses dari: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdaganganluar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>
- SatuData Kementerian Perdagangan. (2023). "Neraca Perdagangan dengan Mitra Dagang Thailand". Diakses dari: Satu Data Kementerian Perdagangan. Neraca Perdagangan dengan Mitra Dagang Malaysia". *Kemendag*. Diakses dari: <https://satudata.kemendag.go.id/datainformasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>
- Suryanto, Venny. (2020). *Kerja Sama LCS Indonesia Thailand diharapkan Dapat Mengurangi Ketergantungan Dolar AS*. Diakses dari:

<https://nasional.kontan.co.id/news/kerjasama-lcs-indonesia-thailand-diharapkan-dapat-mengurangi-ketergantungan-dolar-as>